

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Identifikasi Masalah

Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral yang memegang otoritas kebijakan moneter di Indonesia. BI mempunyai tujuan utama yaitu mempertahankan kestabilan inflasi dan kurs mata uang. Dalam mencapai dua tujuan itu, Bank Indonesia memiliki 3 tugas utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menjaga lancarnya sistem pembayaran, serta menjaga sistem keuangan di Indonesia agar tetap stabil (Bank Indonesia, 2015).

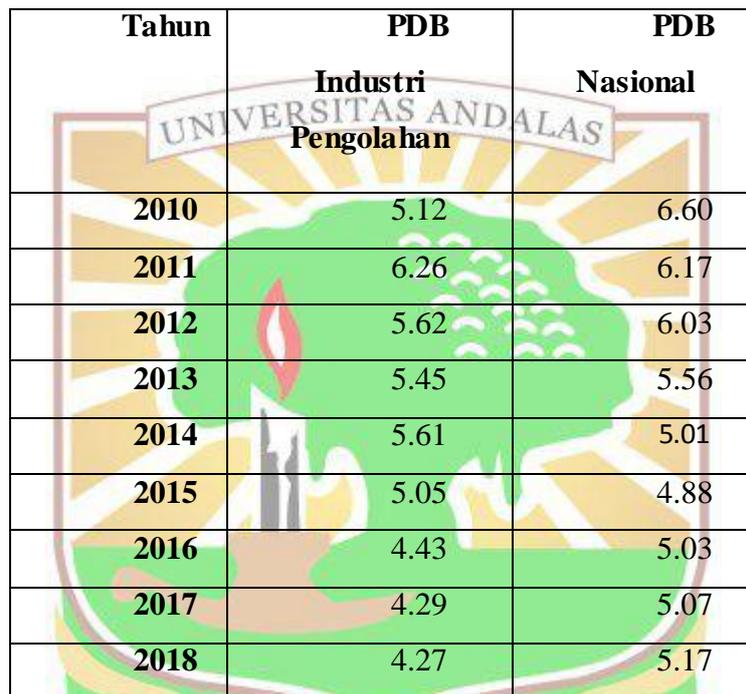
Sebagai bank sentral, Bank Indonesia harus mampu membuat otoritas serta menjalankan kebijakan moneter dengan sebaik-baiknya. Adapun yang dimaksud dengan kebijakan moneter menurut UU No.3 Tahun 2004 ialah kebijakan yang sudah ditetapkan serta dijalankan oleh Bank Indonesia dalam rangka mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Upaya tersebut dijalankan dengan mengendalikan banyaknya jumlah uang beredar (JUB) serta tingkat suku bunga. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan instrumen moneter syariah yang meliputi Operasi Pasar Terbuka (OPT), Cadangan Kas Minimal, Tingkat Bunga Diskonto, Pembujukan Moral, serta melalui Pengawasan Kredit Selektif.

Sebagai suatu negara yang telah menjalankan ekonomi syariah, Indonesia telah melakukan berbagai macam upaya dalam mengendalikan sektor moneter yang didasarkan pada prinsip syariah. Upaya tersebut dikenal dengan Operasi Moneter Syariah (OMS) (Bank Indonesia, 2018). Hingga saat ini, pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka (OPT) pada Operasi Moneter Syariah dijalankan dengan cara menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) ataupun melalui jual beli Sukuk Negara yang dikenal juga dengan nama Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selain melalui OPT, kegiatan Operasi Moneter Syariah juga dijalankan melalui *Standing Facilities Syariah* yang diwujudkan melalui FASBIS (Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah). Menurut Kuncoro (2013), kebijakan moneter yang optimal diharapkan mampu terbukti dalam pertumbuhan ekonomi yang stabil ataupun meningkat, yang mana pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat melalui tingkat PDB setiap tahunnya. Selain tercermin melalui PDB, pertumbuhan sektor riil perekonomian negara juga dapat dilihat melalui tingkat *output* riil yang tercermin melalui Indeks Produksi Industri (IPI). Indeks Produksi Industri ialah kumpulan angka indeks yang menunjukkan bagaimana

perkembangan produksi dari industri manufaktur terkini serta memperlihatkan data series yang lengkap dan juga panjang, yang mana IPI ini dirancang dalam periode bulanan (Maharani, 2017).

Adapun realisasi pertumbuhan *output riil* Indonesia yang tercermin dalam nilai IPI dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

*Tabel 1.1. PDB Industri Pengolahan & PDB Nasional
Tahun 2010-2019*



Tahun	PDB Industri Pengolahan	PDB Nasional
2010	5.12	6.60
2011	6.26	6.17
2012	5.62	6.03
2013	5.45	5.56
2014	5.61	5.01
2015	5.05	4.88
2016	4.43	5.03
2017	4.29	5.07
2018	4.27	5.17

Sumber: BPS, data diolah

Berdasarkan data IPI yang diperoleh dari Badan pusat Statistik, dapat terlihat perbandingan antara PDB Industri Pengolahan (IPI) dengan PDB Nasional pada tahun 2010 sampai tahun 2018. Sektor industri pengolahan merupakan komponen terpenting dalam upaya pembangunan ekonomi negara, yang mana sektor industri pengolahan/manufaktur ini memiliki kontribusi yang cukup besar dalam memengaruhi nilai PDB. Terlihat dari kontribusi Industri pengolahan yang mencapai 19% pada Triwulan I sampai III pada tahun 2019 (Badan Pusat Statistik, 2019).

Adapun berdasarkan tabel yang tabel 1.1., terlihat bahwa pertumbuhan industri pengolahan mengalami nilai yang berubah-ubah namun cenderung menurun mengalami

penurunan hingga tahun 2018. Dari tahun 2010 sampai tahun 2015, nilai industri pengolahan rata-rata sebesar 5%. Namun, sejak tahun 2016 hingga tahun 2018, tingkat pertumbuhan pada industri pengolahan tidak pernah lagi menyentuh angka 5% bahkan terus mengalami perlambatan dengan presentase nilai pertumbuhan sebesar 4.43 persen pada tahun 2016, kemudian terjadi perlambatan lagi menjadi 4.29 persen pada tahun 2017, dan akhirnya turun menjadi angka 4.27 persen pada tahun 2018. Sedangkan tingkat pertumbuhan PDB nasional terlihat terus meningkat dari angka 4.88 persen pada tahun 2015 hingga naik menjadi 5.17 persen pada tahun 2018. Meskipun begitu, dari tabel diatas dapat diambil informasi bahwa tingkat pertumbuhan PDB industri pengolahan dan PDB nasional memiliki nilai yang tidak jauh berbeda setiap tahunnya, yakni bekisar anantara 4 hingga 5 persen.

Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan buah hasil dari usaha yang ditempuh oleh bank sentral dalam upaya menetapkan serta menjalankan kebijakan moneter di Indonesia, sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga, khususnya pada nilai tukar, yang mana hal tersebut mendorong minat para pelaku ekonomi dalam melakukan ekspansi usaha (Bank Indonesia, 2018). Pemerintah melaksanakan kebijakan moneter dalam upaya mengendalikan perkembangan *output* riil yang dapat terlihat melalui data Indeks Produksi Industri (IPI). Pemerintah menggunakan instrumen-instrumen moneter syariah dalam memengaruhi perkembangan *output riil* tersebut (Hasanah, 2011). Di Indonesia sendiri sudah diterapkan kebijakan *dual monetary system* (sistem moneter ganda) yang melibatkan instrumen-instrumen moneter syariah baik melalui Operasi Pasar Terbuka maupun melalui *Standing Facilities Syariah*.

Perbedaan prinsip pada ekonomi konvensional dan syariah, khususnya mengenai sistem bunga, menciptakan adanya penerapan desain kebijakan moneter yang dapat mengakomodir dua jenis kebijakan tersebut, namun masih berada didalam kerangka kebijakan moneter yang utuh (Bayuni, 2018). Dengan adanya dua jenis desain kebijakan moneter yang diterapkan di Indonesia, maka diharapkan kedua jenis kebijakan ini mampu memperlihatkan kinerja yang optimal dan merata dalam mencapai tujuannya, sehingga berdampak secara konkrit pada perkembangan perekonomian di Indonesia, terutama pada sektor riil (pertumbuhan ekonomi).

Ascarya (2009) menyatakan bahwa variabel konvensional, terutama pada sektor finansial, memiliki kontribusi dalam menghambat pertumbuhan ekonomi serta mampu memicu inflasi, kecuali Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang mampu menahan inflasi dengan

nilai kontribusi sebesar 1.52 persen. Disisi lain, ia juga berpendapat bahwa variabel-variabel syariah, khususnya pada sektor riil, memiliki andil atau kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mampu menahan inflasi. Selain pendapat diatas, terdapat juga pendapat lain yang menyatakan bahwa kebijakan moneter tidak efektif pada jangka panjang, namun efektif pada jangka pendek saja. Pendapat ini dikemukakan oleh Teori *Naturale Rate Hypotesis* (Pohan, 2008).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa salah satu tujuan dibentuknya kebijakan moneter syariah adalah untuk memengaruhi tingkat *output riil* pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat melalui Indeks Produksi Industri. Namun, adanya perlambatan pertumbuhan PDB industri pengolahan (IPI) dari tahun 2015 sampai tahun 2018 (seperti yang terlihat pada tabel 1.1) menjadi suatu masalah yang membuat peneliti mempertanyakan bagaimana hubungan yang terjadi antara instrumen moneter syariah terhadap tingkat IPI di Indonesia. Jika salah satu tujuan dibentuknya kebijakan operasi moneter adalah untuk meningkatkan pertumbuhan *output riil* di Indonesia, maka diharapkan pertumbuhan PDB industri mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, bukan malah mengalami penurunan seperti yang terlihat pada tabel 1.1, yang mana pada tabel tersebut terlihat nilai PDB industri terus menurun selama 4 tahun dari angka 5.05 persen pada tahun 2015 menjadi 4.27 persen pada tahun 2018.

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti berpendapat bahwa diperlukan adanya penelitian lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana kontribusi instrumen moneter syariah dalam memengaruhi Indeks Produksi Industri (IPI), sehingga didapatkan informasi terkait signifikansi pengaruh instrumen moneter syariah terhadap tingkat Indeks Produksi Industri (IPI). Selain itu, diperlukan adanya kejelasan terkait apakah instrumen moneter syariah memengaruhi tingkat Indeks Produksi Industri (IPI) secara positif atau justru negatif. Besaran kontribusi instrumen moneter syariah terhadap Indeks Produksi Industri (IPI) juga menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji dalam penelitian ini.

Penelitian tentang pengaruh instrumen kebijakan moneter syariah terhadap IPI sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penulis menjadikan beberapa penelitian terdahulu sebagai rujukan dalam penelitian ini. Meskipun membahas topik yang sama, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jumlah variabel dan rentang waktu penelitian yang lebih lama dibandingkan dengan penelitian terdahulu, serta menggunakan data-data terbaru yang dinilai lebih relevan dalam menganalisa kondisi

perekonomian saat ini. Penelitian ini menggunakan empat variabel independen yang merupakan bagian dari instrumen moneter syariah. Adapun rentang waktu penelitian ini adalah sebanyak 10 tahun (120 bulan), dari Januari 2010 hingga Desember 2019. Hasil penelitian terdahulu penulis paparkan pada BAB II.

Dalam penelitian ini, peneliti berencana untuk menggunakan metode *Vector Auto Regressive (VAR)/Vector Error Correction Model (VECM)*. Meskipun penelitian dengan metode yang sama sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun penulis memandang bahwa diperlukan adanya penelitian lanjutan dengan dukungan data-data terbaru. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Pengaruh Instrumen Moneter Syariah terhadap Indeks Produksi Industri (IPI) di Indonesia pada Tahun 2010-2019.*”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana pengaruh dan kontribusi Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Indeks Produksi Industri (IPI) Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek?
2. Bagaimana pengaruh dan kontribusi Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) terhadap Indeks Produksi Industri (IPI) Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek?
3. Bagaimana pengaruh dan kontribusi Pasar Uang antar Bank Syariah (PUAS) terhadap Indeks Produksi Industri (IPI) Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek?
4. Bagaimana pengaruh dan kontribusi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap Indeks Produksi Industri (IPI) dalam Indonesia jangka panjang dan jangka pendek?

1.3. Tujuan Umum Penelitian

Adapun tujuan umum dari penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan meliputi:

1. Mengidentifikasi pengaruh dan kontribusi Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Indeks Produksi Industri (IPI) Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek.
2. Mengidentifikasi pengaruh dan kontribusi Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) terhadap Indeks Produksi Industri (IPI) Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek.
3. Mengidentifikasi pengaruh dan kontribusi Pasar Uang antar Bank Syariah (PUAS)) terhadap Indeks Produksi Industri (IPI) Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek.
4. Mengidentifikasi pengaruh dan kontribusi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap Indeks Produksi Industri (IPI) Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek.

